

**PENGEMBANGAN MODEL AKUNTANSI PENGELOLAAN ASET DAN INVENTARIS
BUMDES UNTUK MENINGKATKAN KETERTIBAN ADMINISTRASI DAN
AKUNTABILITAS**

**DEVELOPMENT OF ACCOUNTING MODELS IN THE MANAGEMENT OF BUMDES
ASSETS AND INVENTORY TO INCREASE ACCOUNTABILITY**

Anisa^{1*}, Desy Purwasih², Ratih Qadarti Anjilni³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*dosen02385@unpam.ac.id

Abstrak: Pengelolaan aset dan inventaris BUMDes Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, masih menghadapi permasalahan berupa pencatatan yang belum sistematis, dokumentasi aset yang belum lengkap, kode inventaris yang belum diterapkan secara menyeluruh, serta pelaporan dan pengawasan aset yang belum optimal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengembangkan model akuntansi pengelolaan aset dan inventaris yang sederhana, terstruktur, dan sesuai dengan kapasitas pengurus BUMDes. Kegiatan dilaksanakan pada 24 April 2026 dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas pengurus BUMDes dan perangkat desa. Metode kegiatan meliputi identifikasi masalah, pelatihan dan sosialisasi, pengembangan model berbasis Microsoft Excel, praktik inventarisasi, pendampingan, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Model mencakup identifikasi, klasifikasi, kodefikasi, pencatatan, dokumentasi, rekapitulasi, dan pelaporan aset. Hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 62% menjadi 78,57%, atau meningkat sebesar 26,73%. Selain itu, sebanyak 12 aset dan inventaris berhasil diidentifikasi dan dicatat menggunakan model yang dikembangkan. Penerapan model menghasilkan perubahan praktik berupa tersusunnya daftar inventaris, mulai diterapkannya kode aset, dokumentasi yang lebih terstruktur, dan tersedianya laporan aset sederhana. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model akuntansi yang sederhana dan aplikatif dapat memperkuat ketertiban administrasi serta mendukung pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes.

Kata kunci: akuntabilitas; kodefikasi aset; pengendalian internal; pencatatan aset; tata kelola.

Abstract: The management of assets and inventory of BUMDes in Sadeng Village, Leuwisadeng District, still faces problems in the form of incomplete recording, incomplete asset documentation, inventory codes that have not been implemented thoroughly, and asset reporting and supervision that has not been optimal. This Community Service (PKM) activity aims to develop an accounting model for asset and inventory management that is simple, structured, and in accordance with the capacity of BUMDes management. The activity was carried out on April 24, 2026 by involving 20 participants consisting of BUMDes administrators and village officials. Activity methods include problem identification, training and socialization, development of Microsoft Excel-based models, inventory practices, mentoring, and evaluation through pre-test and post-test. The model includes identification, classification, codification, recording, documentation, recapitulation, and asset reporting. The results of the evaluation showed that the average value of participants' understanding increased from 62% to 78.57%, or an increase of 26.73%. In addition, a total of 12 assets and inventories were successfully identified and recorded using the developed model. The application of the model resulted in changes in practices in the form of the compilation of inventory lists, the implementation of asset codes, more structured documentation, and the availability of simple asset reports. These results show that a simple and applicable accounting model can strengthen administrative order and support the control and accountability of BUMDes asset management.

Keywords: *accountability; asset codification; internal control; asset recording; governance.*

Article History:

Received	Revised	Published
24 Juli 2026	11 September 2026	15 September 2026

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa yang berperan dalam mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pendapatan desa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Secara regulatif, keberadaan BUMDes merupakan bagian dari kerangka pembangunan dan pemberdayaan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan mengenai BUMDes kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur antara lain mengenai pendirian, organisasi, kepemilikan, modal, aset, unit usaha, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes (Republik Indonesia, 2021).

Sebagai lembaga yang mengelola sumber daya ekonomi desa, BUMDes membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas usaha dan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup pengelolaan aset dan inventaris yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Aset yang dikelola BUMDes dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, maupun berbagai perlengkapan dan sumber daya lainnya. Pengelolaan aset yang tertib diperlukan agar keberadaan, kondisi, nilai, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas aset dapat diketahui secara jelas oleh pengelola maupun pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan aset dan inventaris memiliki keterkaitan erat dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi memungkinkan informasi mengenai sumber daya organisasi dicatat, diklasifikasikan, dirangkum, dan disajikan secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam konteks BUMDes, kebutuhan terhadap sistem akuntansi semakin penting karena BUMDes memiliki karakteristik sebagai entitas ekonomi desa yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan hasil kegiatan usahanya. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 bahkan telah menyediakan panduan penyusunan laporan keuangan BUM Desa yang dimaksudkan untuk mendukung konsistensi, keseragaman, ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUM Desa (Kementerian Desa PDTT, 2022).

Meskipun demikian, penerapan tata kelola dan sistem akuntansi pada BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah keterbatasan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas. Ana dan Ga (2021), misalnya, menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes masih dapat menghadapi kendala ketika

penyusunan laporan belum sepenuhnya mengikuti standar pelaporan yang sesuai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola dan penguatan sistem administrasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola BUMDes yang lebih baik.

Selain aspek pelaporan keuangan, pengelolaan aset dan inventaris juga menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola BUMDes. Pencatatan aset yang tidak sistematis dapat menyebabkan kesulitan dalam mengetahui jumlah, jenis, nilai, lokasi, kondisi, dan status penggunaan aset. Akibatnya, proses pengawasan dan pengendalian aset menjadi kurang optimal. Penelitian Handayani dan Nugraha (2023) menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan BUMDes, dan peningkatan pendapatan desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dapat mendukung optimalisasi sumber daya ekonomi desa.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMDes karena organisasi tersebut berhubungan dengan kepentingan pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi menuntut tersedianya informasi yang jelas dan dapat diakses, sedangkan akuntabilitas menekankan kemampuan pengelola untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya. Pranoto dan Firdaus (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam tata kelola BUMDes, meskipun implementasinya pada tingkat kelembagaan masih dapat menghadapi kendala, khususnya dalam ketersediaan dan aksesibilitas dokumen serta kepatuhan terhadap kerangka regulasi.

Dalam konteks pengelolaan aset, keberadaan sistem pencatatan yang sederhana dan mudah diterapkan menjadi penting, khususnya bagi BUMDes yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Sistem pengelolaan aset tidak harus menggunakan aplikasi yang kompleks, tetapi harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan dapat ditelusuri. Informasi tersebut setidaknya mencakup identitas aset, klasifikasi aset, jumlah, nilai perolehan, lokasi, kondisi, pengguna atau penanggung jawab, serta perubahan status aset. Dengan pencatatan yang terstruktur, pengurus dapat melakukan pemantauan dan pengendalian aset secara lebih efektif.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tersebut melalui sistem pencatatan berbasis digital. Digitalisasi memungkinkan data aset disimpan secara lebih terstruktur, diperbarui secara berkala, dan digunakan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengawasan serta pengambilan keputusan. Namun, penerapan sistem digital perlu mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan karakteristik kebutuhan BUMDes. Oleh sebab itu, model akuntansi yang dikembangkan perlu mengutamakan prinsip sederhana, praktis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh pengurus BUMDes.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dengan kondisi BUMDes Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil observasi awal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan aset dan inventaris pada BUMDes Desa Sadeng belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi. Pencatatan aset belum terintegrasi dalam suatu sistem yang mampu memberikan informasi secara lengkap mengenai jumlah, jenis, nilai, dan kondisi aset. Pencatatan yang masih

dilakukan secara sederhana juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penelusuran data, pengawasan, pemeliharaan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya klasifikasi aset dan inventaris serta belum tersedianya prosedur yang jelas untuk mengatur siklus pengelolaan aset. Tanpa klasifikasi dan prosedur yang terstruktur, proses penerimaan, pencatatan, penggunaan, pemindahan, pemeliharaan, dan pelaporan aset dapat dilakukan secara tidak konsisten. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi aset yang sebenarnya dan pada akhirnya dapat menghambat proses pengendalian internal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu model akuntansi pengelolaan aset dan inventaris yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas BUMDes Desa Sadeng. Model yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk membantu pengurus melakukan identifikasi dan inventarisasi aset, klasifikasi dan pengkodean aset, pencatatan informasi aset, pengendalian penggunaan, serta penyusunan laporan aset secara lebih sistematis. Model tersebut juga diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan kualitas administrasi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya BUMDes.

Pengembangan model akuntansi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan format pencatatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dalam memahami dan menerapkan pengelolaan aset secara tertib. Pendekatan pendampingan diperlukan agar pengurus tidak hanya memperoleh dokumen atau perangkat pencatatan, tetapi juga mampu memahami proses penggunaannya dan melanjutkan penerapannya setelah kegiatan pengabdian selesai. Pendekatan serupa dalam kegiatan pengabdian pada BUMDes menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola dan penguatan sistem administrasi aset merupakan kebutuhan penting untuk mendukung tata kelola aset yang akuntabel.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan model akuntansi dalam pengelolaan aset dan inventaris BUMDes Desa Sadeng guna meningkatkan ketertiban administrasi, efektivitas pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas. Model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi pengurus BUMDes dalam memperoleh informasi aset yang lebih akurat, melakukan pengawasan secara lebih efektif, serta menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan utama yang dihadapi mitra bukan hanya keterbatasan pencatatan, melainkan belum adanya mekanisme pengelolaan aset yang menghubungkan identifikasi fisik, kodefikasi, pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan dalam satu alur yang sederhana. Kegiatan ini menawarkan model pengelolaan aset berbasis Microsoft Excel yang dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, dan kebutuhan informasi BUMDes. Kebaruan kegiatan terletak pada integrasi tahapan inventarisasi dan pengendalian aset ke dalam model administrasi yang mudah direplikasi oleh BUMDes dengan sumber daya terbatas.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan

partisipatif melalui tahapan identifikasi permasalahan, pelatihan, pengembangan model, praktik inventarisasi, pendampingan, dan evaluasi. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan mitra tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan aset, tetapi juga membutuhkan penerapan langsung sistem pencatatan yang sesuai dengan kondisi operasional BUMDes. Penguatan sistem administrasi dan akuntansi merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes (Akbar et al., 2022; Prasetya & Puspita, 2025).

Secara regulatif, pengelolaan BUM Desa mencakup aspek kepemilikan dan pengelolaan aset serta pertanggungjawaban organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa menekankan pentingnya tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan BUM Desa (Kementerian Desa PDTT, 2022).

1. Lokasi, Waktu, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan pada 24 April 2026 di BUMDes Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sasaran kegiatan adalah pengurus BUMDes dan perangkat desa yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan administrasi dan kegiatan BUMDes. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 20 orang. Keterlibatan perangkat desa dan pengurus BUMDes dimaksudkan agar proses pengembangan model pengelolaan aset tidak hanya dipahami oleh pengelola operasional BUMDes, tetapi juga dapat mendukung koordinasi dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya pada tingkat desa.

2. Metode Pengumpulan Data

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, inventarisasi aset secara langsung, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal pengelolaan aset dan inventaris, termasuk proses pencatatan, penyimpanan dokumen, klasifikasi, dan kondisi fisik aset. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan dalam pengelolaan aset.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi pendukung berupa catatan administrasi dan dokumen yang berkaitan dengan aset dan inventaris. Selanjutnya, tim PKM bersama pengurus BUMDes melakukan inventarisasi secara langsung terhadap aset yang tersedia. Dari proses tersebut berhasil diidentifikasi dan dicatat sebanyak 12 aset dan inventaris yang menjadi objek penerapan model pencatatan. Data yang diperoleh terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi mengenai kondisi pengelolaan aset, permasalahan administrasi, pemahaman pengurus, dan kendala dalam penerapan sistem. Data kuantitatif berupa jumlah aset dan inventaris yang berhasil diidentifikasi serta data hasil pre-test dan post-test peserta.

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi masalah, pelatihan dan sosialisasi, pengembangan model akuntansi, penerapan dan pendampingan, serta evaluasi.

a. Identifikasi Permasalahan

Tahap awal dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan aset dan inventaris BUMDes Desa Sadeng. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi. Oleh karena itu, kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman pengurus dan penerapan sistem pencatatan aset berbasis Excel. Identifikasi awal juga digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi yang harus tersedia dalam pencatatan aset, sehingga model yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pengurus BUMDes.

b. Pelatihan dan Sosialisasi

Tahap kedua dilakukan melalui penyampaian materi mengenai konsep aset dan inventaris, pentingnya administrasi aset, klasifikasi aset, identifikasi aset, pencatatan aset, pengendalian aset, serta keterkaitan pengelolaan aset dengan transparansi dan akuntabilitas. Metode pelatihan menggunakan kombinasi ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, dan praktik. Peserta diberikan kesempatan untuk memahami permasalahan yang selama ini dihadapi dan mempraktikkan secara langsung cara melakukan pencatatan aset menggunakan model yang telah disiapkan.

Pelatihan diberikan kepada 20 peserta yang terdiri atas perangkat desa dan pengurus BUMDes. Penggunaan metode praktik dimaksudkan agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan sistem pencatatan dalam kegiatan administrasi sehari-hari.

c. Pengembangan Model Akuntansi Berbasis Excel

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, tim PKM mengembangkan model akuntansi pengelolaan aset dan inventaris berbasis Microsoft Excel. Pemilihan Excel didasarkan pada pertimbangan kemudahan penggunaan, ketersediaan perangkat, kemampuan pengurus, serta kebutuhan BUMDes terhadap sistem pencatatan yang sederhana dan mudah diperbarui.

Model yang dikembangkan mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

- ✓ identifikasi dan inventarisasi aset;
- ✓ klasifikasi aset dan inventaris;
- ✓ pemberian kode atau identitas aset;
- ✓ pencatatan nama dan jenis aset;
- ✓ pencatatan jumlah aset;
- ✓ pencatatan nilai atau informasi perolehan;
- ✓ pencatatan lokasi aset;
- ✓ pencatatan kondisi aset;
- ✓ pencatatan penanggung jawab atau pengguna aset; dan
- ✓ rekapitulasi data aset dan inventaris.

Model tersebut dirancang untuk membantu pengurus memperoleh informasi aset secara lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Penggunaan sistem pencatatan yang terstruktur juga diharapkan dapat mendukung pengendalian dan penyusunan informasi yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes.

d. Inventarisasi dan Pendampingan

Tahap selanjutnya adalah penerapan model melalui inventarisasi aset secara langsung. Tim PKM bersama pengurus BUMDes melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan aset dan inventaris di lokasi kegiatan. Setiap aset yang ditemukan diidentifikasi berdasarkan jenis,

jumlah, kondisi, dan informasi lain yang diperlukan dalam model pencatatan. Sebanyak 12 aset dan inventaris berhasil diidentifikasi dan dicatat menggunakan format Excel yang dikembangkan. Proses ini sekaligus menjadi praktik langsung bagi pengurus BUMDes dalam menggunakan sistem pencatatan.

Pendampingan dilakukan selama proses inventarisasi dan pencatatan untuk membantu peserta ketika mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi, memasukkan data, maupun memahami penggunaan format Excel. Melalui pendampingan tersebut, pengurus tidak hanya menerima model pencatatan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam penerapannya. Pendekatan pendampingan dipandang penting karena penelitian mengenai tata kelola BUMDes menunjukkan bahwa praktik akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas membutuhkan dukungan sistem serta kapasitas pengelola agar dapat berjalan secara konsisten (Titania, 2021; Akbar et al., 2022).

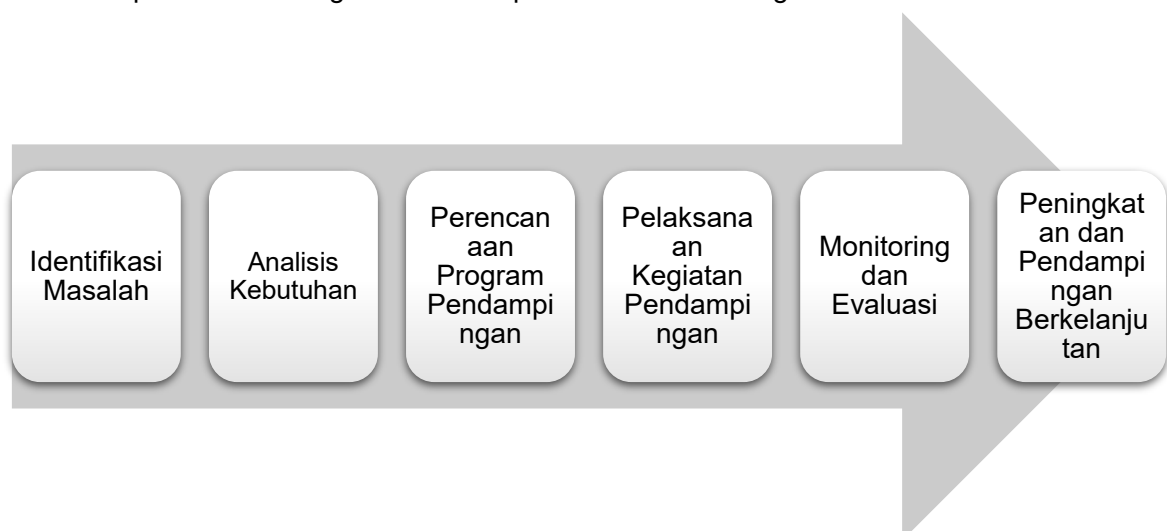
e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Instrumen evaluasi menggunakan pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta sebelum dan setelah kegiatan pelatihan. Pre-test digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman awal peserta mengenai pengelolaan aset dan inventaris. Selanjutnya, post-test diberikan setelah penyampaian materi, praktik, dan pendampingan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta.

Keberhasilan program dianalisis berdasarkan dua indikator, yaitu perubahan hasil pre-test dan post-test serta perubahan praktik pengelolaan aset sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata pemahaman peserta dan hasil penerapan model. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas model yang dikembangkan dan mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan dalam penerapan pengelolaan aset dan inventaris BUMDes.

4. Alur Metode Kegiatan

Alur pelaksanaan kegiatan PKM dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Metode Kegiatan

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM menggunakan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah mitra secara langsung. Model akuntansi tidak hanya diperkenalkan melalui pelatihan, tetapi juga diuji melalui praktik inventarisasi dan pencatatan aset. Dengan demikian, hasil kegiatan dapat dilihat dari aspek peningkatan pemahaman peserta maupun perubahan praktik administrasi aset pada BUMDes Desa Sadeng.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pengembangan Model Akuntansi Pengelolaan Aset Dan Inventaris Bumdes Untuk Meningkatkan Ketertiban Administrasi Dan Akuntabilitas” telah dilaksanakan pada 24 April 2026 di Desa Sadeng, Bogor. Kegiatan diikuti oleh pengurus BUMDes, perangkat desa, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan administrasi desa sebanyak 20 orang. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan identifikasi, pencatatan, pengkodean, inventarisasi, pengendalian, serta pelaporan aset dan inventaris BUMDes secara sistematis.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif pada pemahaman dan kemampuan peserta dalam pengelolaan aset BUMDes. Perubahan tersebut terutama terlihat pada kemampuan peserta dalam mengidentifikasi aset, mengelompokkan aset berdasarkan jenis dan fungsi, melakukan pencatatan aset, menggunakan kode inventaris, menyusun daftar inventaris, serta membuat laporan aset sederhana. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa model akuntansi yang dikembangkan telah dapat diterima dan mulai diterapkan oleh pengurus BUMDes.

Kondisi Awal Pengelolaan Aset dan Inventaris BUMDes

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan inventaris BUMDes Desa Sadeng masih menghadapi sejumlah permasalahan administratif. Pencatatan aset sebagian besar masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan format administrasi yang seragam. Selain itu, belum seluruh aset memiliki kode inventaris dan dokumentasi aset belum tersusun secara sistematis. Temuan kondisi awal pengelolaan aset disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Awal Pengelolaan Aset dan Inventaris BUMDes Desa Sadeng

No.	Aspek yang Diamati	Kondisi Awal	Permasalahan
1	Buku inventaris aset	Belum tersedia secara lengkap	Data aset belum terdokumentasi secara menyeluruh
2	Pencatatan aset	Dilakukan secara manual dan belum sistematis	Berpotensi terjadi ketidaksesuaian data
3	Kode inventaris	Belum seluruh aset memiliki kode	Identifikasi dan penelusuran aset menjadi sulit

4	Dokumen aset	Belum tersusun secara terstruktur	Dokumen sulit ditelusuri ketika diperlukan
5	Laporan aset	Belum dibuat secara berkala	Pengawasan dan evaluasi aset belum optimal
6	Pengawasan aset	Masih terbatas	Penggunaan dan kondisi aset belum termonitor secara optimal

Sumber: Hasil observasi tim PKM, 2026.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa permasalahan utama bukan hanya berkaitan dengan belum lengkapnya pencatatan, tetapi juga dengan belum terbentuknya sistem administrasi aset yang terintegrasi. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Aset yang tidak terdokumentasi secara baik akan menyulitkan pengurus dalam mengetahui jumlah, jenis, lokasi, kondisi, dan status penggunaan aset.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari sistem akuntabilitas organisasi. Padahal, informasi mengenai aset diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, pengawasan internal, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan model administrasi yang sederhana, mudah diterapkan, dan disesuaikan dengan kemampuan pengurus BUMDes.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan aset dan inventaris BUMDes. Materi yang diberikan mencakup konsep dasar akuntansi aset, teknik inventarisasi, sistem pengkodean, penyusunan buku inventaris, penyusunan laporan aset, dan pengendalian internal. Untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, hasil pre-test dan post-test dapat disajikan sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No.	Indikator Pemahaman	Nilai Rata-rata Pre-test (%)	Nilai Rata-rata Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Identifikasi aset BUMDes	65	80	23
2	Pengelompokan aset	60	75	25
3	Teknik inventarisasi	60	80	33,33
4	Sistem pengkodean inventaris	60	78	30
5	Pencatatan aset masuk dan keluar	65	75	15,38
6	Penyusunan laporan aset	65	80	23
7	Pengendalian internal aset	60	82	36,67
Rata-rata		62	78,57	26,64

Sumber: Data hasil pre-test dan post-test peserta PKM, 2026.

Peningkatan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Peningkatan (\%)} = ((\text{Nilai post-test} - \text{Nilai pre-test}) / \text{Nilai pre-test}) \times 100\%$$

Berdasarkan data tersebut, apabila nilai rata-rata post-test lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pre-test, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan memberikan peningkatan pengetahuan peserta. Analisis ini penting karena keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari kehadiran dan antusiasme peserta, tetapi juga dari perubahan pengetahuan yang dapat diukur. Selain hasil tes, perubahan pemahaman juga terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali fungsi pencatatan aset dan mempraktikkan penggunaan format administrasi yang diberikan. Peserta mulai memahami bahwa inventarisasi bukan sekadar kegiatan mencatat barang, tetapi merupakan bagian dari pengendalian aset yang berfungsi untuk memastikan keberadaan, kondisi, lokasi, dan penggunaan aset dapat diketahui secara jelas.

Penerapan Model Akuntansi Aset dan Inventaris

Penerapan model akuntansi sederhana memberikan perubahan pada pola administrasi aset BUMDes. Pengurus mulai melakukan pendataan ulang terhadap aset yang dimiliki dan mengelompokkannya berdasarkan jenis serta fungsi. Aset yang sebelumnya belum tercatat mulai didokumentasikan dan diberikan identitas atau kode inventaris.

Perubahan penerapan administrasi aset dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah PKM

No.	Indikator	Sebelum PKM	Sesudah PKM
1	Daftar inventaris	Belum lengkap	Mulai disusun secara sistematis
2	Identifikasi aset	Belum seluruh aset teridentifikasi	Aset mulai didata ulang
3	Kode inventaris	Belum diterapkan secara menyeluruh	Mulai diterapkan
4	Dokumentasi aset	Belum terstruktur	Mulai disusun dan didokumentasikan
5	Pencatatan aset	Manual dan tidak seragam	Menggunakan format yang lebih terstruktur
6	Laporan aset	Belum dilakukan secara berkala	Mulai disusun dalam bentuk laporan sederhana
7	Pengawasan	Masih terbatas	Mulai dilakukan melalui pencatatan dan pemeriksaan aset

Sumber: Hasil observasi dan pendampingan tim PKM, 2026.

Tabel 3 menunjukkan adanya perubahan pada aspek administrasi dan pengendalian aset. Model yang diterapkan tidak menuntut penggunaan sistem yang kompleks, tetapi menekankan konsistensi pencatatan dan dokumentasi. Pendekatan tersebut dipandang lebih sesuai dengan kondisi BUMDes Desa Sadeng karena dapat diterapkan dengan sarana administrasi yang tersedia.

Salah satu perubahan penting adalah mulai diterapkannya sistem pengkodean inventaris. Pemberian kode memungkinkan setiap aset memiliki identitas yang lebih jelas sehingga mempermudah proses penelusuran dan pengawasan. Selain itu, tersedianya daftar

inventaris memberikan dasar bagi pengurus untuk melakukan pemeriksaan berkala terhadap keberadaan dan kondisi aset.



Gambar 2. Proses Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Aset

Pembahasan

Hasil PKM menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan aset BUMDes Desa Sadeng terletak pada belum optimalnya sistem pencatatan, dokumentasi, pengkodean, dan pengawasan aset. Kondisi awal tersebut berimplikasi terhadap kemampuan BUMDes dalam menghasilkan informasi aset yang akurat dan mudah ditelusuri. Ketidaklengkapan informasi aset juga dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian antara catatan administratif dengan kondisi aset yang sebenarnya.

Pengembangan model akuntansi dalam kegiatan ini memberikan solusi dengan memperkenalkan sistem administrasi yang lebih sederhana dan terstruktur. Model tersebut menempatkan pencatatan dan inventarisasi sebagai bagian penting dari pengendalian aset. Dengan tersedianya daftar inventaris, kode aset, dokumentasi, dan laporan berkala, pengurus memiliki informasi yang lebih jelas mengenai aset yang dimiliki, digunakan, maupun dipelihara oleh BUMDes.

Temuan kegiatan juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap aset. Sebelum kegiatan, pencatatan aset cenderung dipandang sebagai kegiatan administratif yang bersifat rutin. Setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, peserta mulai memahami bahwa pencatatan aset memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Perubahan cara pandang tersebut merupakan salah satu hasil penting karena keberlanjutan sistem administrasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen pengurus.

Dari perspektif akuntabilitas, sistem pencatatan aset yang lebih tertib dapat memperkuat kemampuan BUMDes dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Data aset yang terdokumentasi memungkinkan pemerintah desa dan pihak terkait melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara lebih mudah. Dengan demikian, peningkatan kualitas administrasi aset tidak hanya memberikan manfaat internal bagi pengurus BUMDes, tetapi juga mendukung transparansi kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Hasil pendampingan juga memperlihatkan bahwa pendekatan yang bersifat praktis lebih mudah diterima oleh peserta dibandingkan penyampaian konsep akuntansi secara teoritis semata. Peserta dapat langsung menghubungkan materi dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam kegiatan operasional BUMDes. Hal tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menggunakan format inventaris dan melakukan pendataan ulang aset secara langsung. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan model akuntansi untuk BUMDes perlu mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas pengelola. Sistem yang terlalu kompleks berpotensi sulit diterapkan secara konsisten, sedangkan model yang sederhana, terstruktur, dan aplikatif lebih memungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Oleh karena itu, model akuntansi yang dikembangkan dalam kegiatan ini diarahkan pada prosedur yang mudah dipahami tetapi tetap mampu menghasilkan informasi aset yang diperlukan untuk pengawasan dan pertanggungjawaban.

Meskipun demikian, penerapan model masih menghadapi beberapa kendala. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta menyebabkan tingkat pemahaman terhadap administrasi berbasis akuntansi tidak sama. Selain itu, keterbatasan sarana administrasi dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi. Oleh sebab itu, hasil positif yang diperoleh dari kegiatan ini perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan secara berkala, pembaruan data inventaris, serta evaluasi penerapan sistem.

Namun, hasil kegiatan perlu diinterpretasikan secara proporsional. Evaluasi dilakukan pada satu lokasi dengan 20 peserta dan pengukuran pascakegiatan dilakukan dalam periode pelaksanaan yang relatif singkat. Dengan demikian, peningkatan skor dan perubahan administrasi belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa akuntabilitas BUMDes telah meningkat secara permanen. Indikator yang lebih tepat dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman, keteraturan administrasi, dan tersedianya mekanisme pengendalian aset yang dapat mendukung akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa tujuan PKM untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus BUMDes dalam mengelola aset dan inventaris telah tercapai secara positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan peserta dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi aset, mulai diterapkannya sistem pengkodean, tersusunnya administrasi aset yang lebih sistematis, serta meningkatnya kemampuan dalam menyusun laporan aset sederhana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa model akuntansi yang dikembangkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Desa Sadeng.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya tercermin dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari mulai terbentuknya pola administrasi aset yang lebih

tertib. Agar manfaat tersebut dapat dipertahankan, BUMDes perlu melakukan inventarisasi secara berkala, memperbarui daftar aset ketika terjadi penambahan atau pengurangan aset, menggunakan kode inventaris secara konsisten, serta melakukan pemeriksaan dan pelaporan aset secara periodik. Keberlanjutan praktik tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa peningkatan akuntabilitas yang dihasilkan melalui kegiatan PKM dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Kegiatan PKM di BUMDes Desa Sadeng berhasil mengembangkan dan menerapkan model akuntansi pengelolaan aset dan inventaris berbasis Microsoft Excel yang mencakup identifikasi, klasifikasi, kodefikasi, pencatatan, dokumentasi, rekapitulasi, dan pelaporan. Nilai rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 62% menjadi 78,57% atau sebesar 26,73%, sedangkan 12 aset dan inventaris berhasil diidentifikasi dan dicatat menggunakan model tersebut.

Penerapan model mengubah praktik administrasi dari pencatatan yang belum seragam menjadi lebih terstruktur dan mudah ditelusuri. Hasil ini menunjukkan bahwa model sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas mitra dapat mendukung pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan aset. Keberlanjutan manfaat tetap memerlukan pembaruan data, pemeriksaan fisik, dan penggunaan kode inventaris secara konsisten.

Saran

Keberlanjutan hasil PKM perlu didukung melalui penerapan sistem administrasi aset secara konsisten oleh pengurus BUMDes. Inventarisasi dan pemeriksaan aset perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi aset di lapangan. Setiap penambahan, pengurangan, pemindahan, atau perubahan kondisi aset juga perlu segera diperbarui dalam daftar inventaris dan dokumentasi BUMDes.

Untuk pengembangan program selanjutnya, pendampingan dapat diarahkan pada digitalisasi sistem pengelolaan aset melalui penggunaan spreadsheet atau aplikasi sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan pengurus. Program lanjutan juga dapat mencakup penguatan pengendalian internal, penyusunan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan aset, serta evaluasi berkala terhadap penerapan model akuntansi. Dengan langkah tersebut, model yang telah diperkenalkan diharapkan tidak hanya meningkatkan ketertiban administrasi, tetapi juga dapat membentuk sistem pengelolaan aset BUMDes yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sadeng, Bogor, serta pengurus BUMDes Desa Sadeng yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan

terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan aset dan inventaris BUMDes. Apresiasi disampaikan pula kepada pihak perguruan tinggi dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., Suryantara, A. B., & Hendri, R. S. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>.
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>.
- Handayani, R. D., & Nugraha, A. A. (2023). Pengaruh pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan profesionalisme aparatur desa terhadap peningkatan pendapatan desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5203>.
- Handayani, S., & Rahmawati, D. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Desa*, 5(2), 45–56.
- Hidayat, T., & Sari, M. (2023). Optimalisasi pengelolaan keuangan BUMDes berbasis digital dalam meningkatkan akuntabilitas desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3), 120–129.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pranoto, P. I., & Firdaus, S. U. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes (Studi kasus BUMDes Sejahtera Cemani). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.
- Prasetya, W. A., & Puspita, P. (2025). Determinan pengelolaan keuangan BUMDES: Perspektif transparansi dan akuntabilitas. *Borobudur Accounting Review*, 5(1), 43–54. <https://doi.org/10.31603/bacr.13952>.
- Putri, A. N., & Kurniawan, R. (2021). Implementasi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes untuk meningkatkan transparansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 88–97.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Susanto, A. (2017). *Sistem informasi akuntansi: Pemahaman konsep secara terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Widjajanto, N. (2018). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Erlangga.